

## **PENDAPATAN NASIONAL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM ANTARA KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN**

Nur Aini<sup>1</sup>, Syahriah Semaun<sup>2</sup>

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia*

<sup>1</sup>nurainipembonan@gmail.com

<sup>2</sup>syahriah.semaun@gmail.com

---

### ***Abstrak***

---

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya diukur dari sisi pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga dari aspek keadilan dan kesejahteraan (*falah*) masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam, menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, distribusi yang adil, dan pencapaian kesejahteraan material maupun spiritual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen, serta kajian pemikiran para ahli ekonomi Islam seperti Chapra, Mannan, dan Antonio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasional dalam ekonomi Islam harus berasal dari aktivitas yang halal dan produktif, didistribusikan secara adil melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesimpulannya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

**Kata kunci: pendapatan nasional, ekonomi Islam, keadilan, kesejahteraan, distribusi pendapatan.**

---

### ***Abstract***

---

National income is one of the main indicators used to assess a country's economic condition. However, in the perspective of Islamic economics, national income is not only measured in terms of quantitative growth, but also in terms of justice and societal welfare (*falah*). This article aims to analyze the concept of national income within the Islamic economic system, emphasizing the integration between economic growth, fair distribution, and the achievement of both material and spiritual well-being. The research method used is qualitative-descriptive through literature review, document analysis, and examination of the thoughts of Islamic economists such as Chapra, Mannan, and Antonio. The

---

---

results show that national income in Islamic economics must originate from lawful (*halal*) and productive activities, be distributed fairly through instruments such as *zakat*, *infak*, *sadaqah*, and *waqf*, and be directed toward improving the overall welfare of society. In conclusion, national income from the perspective of Islamic economics is not merely an indicator of economic growth but also a tool to realize social justice and sustainable prosperity.

**Keywords: national income, Islamic economics, justice, welfare, income distribution.**

---

## **Pendahuluan**

Pendapatan nasional merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kemakmuran dan kinerja ekonomi suatu negara. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional didefinisikan sebagai nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua faktor produksi di suatu negara selama periode tertentu (Sukirno, 2013). Peningkatan pendapatan nasional sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, karena dianggap mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesetaraan sosial dan keadilan. Banyak negara dengan pendapatan nasional tinggi masih menghadapi ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, kemiskinan, dan pengangguran (Todaro & Smith, 2015).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan aspek spiritual, moral, dan sosial sebagai landasan kegiatan ekonomi. Islam memandang kemakmuran sejati (*falah*) tidak hanya diukur dari perbaikan material, tetapi juga dari keadilan distribusi dan berkah dalam kekayaan (Chapra, 2000). Ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi produksi, tetapi juga keadilan dalam akses dan distribusi sumber daya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hashr, ayat 7:

“...agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian.” (QS. Al-Hasyr: 7) Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dalam ekonomi Islam, keadilan (*'adl*) merupakan prinsip utama yang mengatur

semua aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, distribusi, dan kebijakan publik.

Keadilan ekonomi dalam Islam tidak berarti kesetaraan mutlak dalam hasil, tetapi kesetaraan dalam kesempatan dan proporsionalitas sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan (Mannan, 1992). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam melarang praktik-praktik yang menyebabkan ketidakadilan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), karena aktivitas-aktivitas ini menyebabkan ketidaksetaraan dan mengalihkan kekayaan dari sektor riil ke sektor non-produktif (Antonio, 2001).

Selain itu, Islam memperkenalkan instrumen redistribusi pendapatan seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas ekonomi di antara masyarakat. Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin (Hassan & Lewis, 2007). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga pada pencapaian kemakmuran yang adil dan berkelanjutan (*falah*).

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian atau pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan sebagai dua prinsip utama dalam pembangunan ekonomi yang adil secara sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam sistem ekonomi nasional untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya produktif tetapi juga membawa berkah bagi seluruh masyarakat.

### **Tinjauan Pustaka**

Pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif, seperti peningkatan produk dan pendapatan, tetapi juga pada dimensi moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional umumnya diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan

Produk Nasional Bruto (PNB), yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu (Mankiw, 2016). Namun, pendekatan tersebut dianggap belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat karena lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan hasil pembangunan (Todaro & Smith, 2015).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional harus mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Menurut Mannan (1986), pendapatan nasional dalam Islam harus bersumber dari kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan memberikan manfaat sosial. Selaras dengan itu, Chapra (1992) menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar peningkatan kekayaan nasional, tetapi tercapainya *falah* atau kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.

Untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan, Islam memperkenalkan berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Antonio (2001) menjelaskan bahwa instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk menyeimbangkan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui mekanisme tersebut, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, terciptanya keadilan sosial, serta terjaganya nilai-nilai moral dan spiritual (Chapra, 2000). Dengan demikian, pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam harus diorientasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil (*equitable growth*), di mana kemakmuran material berjalan seiring dengan kesejahteraan sosial dan spiritual. Integrasi antara pertumbuhan, keadilan, dan kesejahteraan inilah yang menjadi ciri khas ekonomi Islam dalam menilai dan mengelola pendapatan nasional, sehingga ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana akumulasi kekayaan, tetapi juga

sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena dianggap cocok untuk memahami fenomena ekonomi Islam secara mendalam melalui analisis konsep, nilai, dan prinsip yang mendasarinya. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi realitas sosial yang kompleks, daripada sekadar mengukur hubungan variabel secara kuantitatif (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, peneliti berusaha menginterpretasikan konsep pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam melalui tinjauan literatur, Al-Qur'an dan hadis, serta pemikiran para ekonom Islam kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, di mana sumber data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran para ulama dan ekonom Islam seperti M. Umer Chapra, M. A. Mannan, dan M. Syafi'i Antonio, yang telah membahas hubungan antara keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi dari perspektif Islam. Data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan prinsip yang menggambarkan bagaimana konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi konvensional (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, data yang diperoleh dari berbagai sumber diklasifikasikan dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Kedua, data disusun secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi dan perbandingan. Ketiga, analisis interpretatif dilakukan untuk mengeksplorasi makna substansial dari prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap pendapatan nasional, khususnya dalam konteks keadilan ('adl) dan kesejahteraan (falah) (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan informasi dari berbagai literatur dan pendapat ahli guna memperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sistem ekonomi Islam menempatkan nilai keadilan dan kesejahteraan dalam pembentukan dan distribusi pendapatan nasional.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Analisis literatur menunjukkan bahwa konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, pendapatan nasional lebih ditekankan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan total produksi barang dan jasa (Sukirno, 2013). Namun, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional bukan sekadar angka, tetapi juga indikator keadilan distribusi dan berkah (Chapra, 2000). Pendapatan tinggi tidak berarti apa-apa jika diperoleh melalui praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau spekulasi maysir (Antonio, 2001).

Selain itu, ekonomi Islam menekankan bahwa pendapatan nasional harus diperoleh dari kegiatan yang produktif dan halal, serta mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan M. A. Mannan (1992), yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus bersifat holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, pendapatan nasional syariah mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, sehingga menciptakan kesejahteraan (*falah*) bagi seluruh masyarakat.

### **2. Keadilan dalam Distribusi Pendapatan**

Salah satu temuan utama dari analisis literatur adalah bahwa keadilan (*'adl*) merupakan landasan pengelolaan pendapatan nasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7). Dalam praktiknya, keadilan ini diwujudkan melalui instrumen redistribusi pendapatan, seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan ekonomi dengan mentransfer sebagian kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan (Hassan & Lewis, 2007).

Selain itu, negara memiliki peran penting sebagai regulator untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil. Menurut Chapra (2000), peran negara dalam ekonomi Islam meliputi pengawasan dan regulasi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berada dalam kerangka hukum Syariah dan meminimalkan ketidaksetaraan sosial. Dengan mekanisme distribusi yang adil, pendapatan nasional tidak hanya akan meningkat secara kuantitatif, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

### **3. Pendapatan Nasional dan Kesejahteraan (Falah)**

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa tujuan akhir pendapatan nasional dalam perspektif Islam adalah kesejahteraan (*falah*), yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual (Chapra, 2000; Mannan, 1992). Pendapatan yang dihasilkan harus mendukung kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Ekonomi Islam menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya tercermin dalam PDB atau tingkat konsumsi, tetapi juga dalam kualitas moral masyarakat, akses terhadap kebutuhan dasar, dan berkah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi (Antonio, 2001).

Kesejahteraan ini dapat dicapai melalui sinergi antara pertumbuhan ekonomi produktif, distribusi pendapatan yang adil, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Alat redistribusi seperti zakat, infaq, dan waqf merupakan sarana penting untuk menciptakan kesetaraan pendapatan, sehingga pendapatan nasional tidak hanya menghasilkan kemakmuran material tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan spiritual masyarakat (Hassan & Lewis, 2007).

### **4. Integrasi Keadilan dan Kesejahteraan dalam Kebijakan Ekonomi**

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam harus mengintegrasikan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam setiap kebijakan ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat (Chapra, 2000). Kebijakan fiskal berbasis syariah, seperti pengelolaan zakat, perpajakan yang adil, subsidi bagi kaum miskin, dan penguatan sektor riil, merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendapatan nasional yang produktif dan adil.

Oleh karena itu, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam bukan sekadar ukuran pertumbuhan ekonomi, tetapi indikator kualitas hidup masyarakat, yang mencerminkan keadilan distribusi, berkah, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Mannan, 1992; Antonio, 2001).

### **Kesimpulan dan Saran**

Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pertumbuhan kuantitatif, ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi harus berasal dari aktivitas yang halal dan produktif, menghindari praktik yang merugikan orang lain, seperti riba, gharar, dan spekulasi *maysir* (Chapra, 2000; Antonio, 2001). Oleh karena itu, berkah dan etika merupakan unsur penting dalam setiap proses penciptaan pendapatan nasional.

Selain itu, keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan prinsip utama yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem konvensional. Alat redistribusi seperti zakat, *infaq*, *sadaqah*, dan *waqf* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi didistribusikan secara merata sesuai dengan hak dan kebutuhan masyarakat (Hassan & Lewis, 2007). Mekanisme ini tidak hanya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat pendapatan nasional ke semua lapisan masyarakat.

Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan (*falah*) dalam kerangka ini tidak hanya diukur dalam hal material, seperti peningkatan PDB atau konsumsi, tetapi juga dalam hal kesejahteraan moral, sosial, dan spiritual masyarakat (Mannan, 1992). Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai ketika pertumbuhan ekonomi, distribusi yang adil, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seimbang.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai sarana untuk membangun kemakmuran yang berkelanjutan dan adil, bukan sekadar sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan ('adl) dan kemakmuran (falah), pendapatan nasional dapat mencerminkan perkembangan etis dan produktif yang membawa berkah bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesuksesan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan material, tetapi juga dari kualitas hidup sosial dan spiritual masyarakat secara keseluruhan.

### **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ika Suhartanti Darmo Vitayanti Fattah, et al. 2025. Business Management. Publisher: Mawadra Lestari Enterprise. Kuala Lumpur
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Hendra, A Soemitra, ZM Nawawi, M Rizal, MF Rahmadana. (2025) [Redefining Network Marketing: A Maqashid Shariah-Based Business Model For Community Prosperity](#). International Journal of Environmental Sciences 11 (6), 2025.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.
- Mannan, M. A. (1992). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of economics* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muhammad Rizal et al, 2025 “ Buku Ajar Akuntansi Syariah” Penerbit CV.LARISPA. <https://www.larispa.co.id/segera-terbit-buku-akuntansi-syariah/>
- Muhammad Rizal, Muhammad Ramadhan, Nurlaila , Kamila, Saparuddin Siregar, 2024 [Social Responsibility Orientation of Banking in Indonesia \(Case Study](#)

[on Islamic Banking in North Sumatra](#)). *Journal Of Ecohumanism* 3 (03), 22-47, 2024.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi teori pengantar* (Edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson Education Limited.